

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi kerakyatan dipahami sebagai suatu sistem yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam aktifitas ekonomi, dengan orientasi pada terciptanya keadilan sosial dan pemerataan manfaat pembangunan. Di Indonesia, model ini mengemuka sebagai respon terhadap ketidakadilan struktural yang sering muncul dari praktik ekonomi liberal dan kapitalistik, yang cenderung menekan peran pelaku usaha kecil dan menengah (Sentosa, 2015).

Menurut Hatta, yang dikenal sebagai pencetus konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia. Ekonomi kerakyatan bukan sekadar sistem ekonomi biasa, tetapi suatu konsep yang menekankan keterlibatan aktif rakyat dalam menjalankan roda perekonomian. Bagi Hatta, rakyat tidak boleh hanya dijadikan objek yang menerima hasil pembangunan, melainkan harus menjadi subjek atau pelaku utama dalam proses ekonomi itu sendiri.

Prinsip utama dalam ekonomi kerakyatan versi Hatta meliputi semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian (Hatta, 1957). Artinya, pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menindas dan memberikan ruang bagi rakyat kecil untuk berkembang, seperti melalui koperasi dan usaha bersama. Dengan kata lain, efisiensi ekonomi harus berjalan seimbang dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pemerataan hasil. Konsep ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap sistem kapitalis yang dianggap hanya menguntungkan segelintir orang.

Berbanding terbalik dengan kenyataan dalam beberapa tahun terakhir, arah pembangunan ekonomi Indonesia cenderung berpihak pada sistem pasar bebas yang membuka ruang sebesar-besarnya bagi kekuatan modal besar untuk mendominasi sektor-sektor strategis. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha berskala besar semakin diuntungkan, baik dalam akses terhadap sumber daya, regulasi yang mendukung, hingga kemudahan dalam memperoleh insentif pemerintah. Sebaliknya, kelompok usaha kecil dan menengah (UMKM), yang

seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, justru kerap terpinggirkan oleh ketatnya persaingan dan minimnya perlindungan kebijakan (Gayatri & Nurranto, 2023).

Realitas ini terlihat jelas dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan nasional masih berada di kisaran 9,54%. Angka tersebut menggambarkan bahwa meskipun secara makro ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan, pemerataan hasil pembangunan belum sepenuhnya tercapai. Kelompok masyarakat menengah ke bawah masih mengalami keterbatasan dalam mengakses manfaat pertumbuhan tersebut, baik dari sisi pendapatan, lapangan kerja, maupun kualitas hidup. Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Gayatri & Nurranto, 2023).

Kelompok masyarakat yang berada di pinggiran ekonomi justru menjadi pihak yang paling merasakan tekanan dari kebijakan pembangunan yang dominan berpihak pada para pengusaha besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap konsep ekonomi kerakyatan meninjau ulang serta menyesuaikannya dengan konteks sosial-ekonomi terkini. Dengan reinterpretasi yang terkonkretisasi dan relevan, ekonomi kerakyatan diharapkan dapat diperkuat sebagai kerangka acuan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam masa pemulihan ekonomi saat ini (Nurhayati dkk, 2025).

Memperkuat ekonomi kerakyatan merupakan strategi yang krusial untuk mengatasi tiga masalah besar: ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi yang semakin menganga. Ekonomi kerakyatan tidak hanya dipandang sebagai alat pemulihan pasca-pandemi COVID-19, tetapi juga sebagai fondasi bagi pertumbuhan inklusif yang memilah manfaatnya secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Menurut riset dari Salam (*Islamic Economics Journal*), strategi pengembangan ekonomi kerakyatan pasca-COVID-19 membutuhkan intervensi pemerintah berupa kebijakan dan fasilitas untuk menggerakkan

UMKM, koperasi, dan usaha rakyat agar bangkit kembali lebih cepat (Anjani dkk, 2023). Dukungan ini penting karena pandemi telah melemaskan sektor informal yang sangat bergantung pada ekonomi kerakyatan.

Studi dari SMERU juga mengestimasi bahwa pandemi menambah 1,3 juta orang miskin pada akhir 2020, bahkan bisa mencapai 8,5 juta dalam skenario buruk, menyoroti perlunya perluasan program perlindungan sosial seiring penguatan kerakyatan (Sani dkk, 2021). Dengan dasar riset tersebut, ekonomi kerakyatan yang diperbaharui, integratif dan berbasis rakyat dapat diterapkan sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemulihan ekonomi setelah krisis, tetapi juga menjaga agar pertumbuhan tidak meninggalkan golongan paling rentan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia masih menghadapi kendala struktural, mulai dari infrastruktur, literasi digital, hingga akses terhadap pasar daring yang kompetitif. Di tengah era digitalisasi yang begitu cepat, banyak UMKM tertinggal karena minimnya infrastruktur digital dan keterampilan sumber daya manusia yang belum siap bersaing di pasar global (Suryana, 2020). Itu artinya, keberadaan UMKM tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mengakses permodalan yang memadai, keterbatasan literasi keuangan, serta kesulitan beradaptasi dengan teknologi digital yang kini menjadi syarat utama dalam persaingan bisnis.

Supaya UMKM bisa tumbuh dan bersaing di era sekarang, peran pemerintah, lembaga keuangan, serta berbagai pihak lainnya sangat penting. Mereka bukan hanya perlu memberikan akses modal, tapi juga pelatihan dan pendampingan yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Tanpa dukungan nyata seperti itu, UMKM akan kesulitan untuk naik kelas. Oleh karena itu, kebijakan yang mempermudah akses pembiayaan dan meningkatkan kapasitas SDM menjadi sangat krusial dalam mendorong kemajuan (Tambunan, 2019). Meski sering dianggap sebelah mata dalam perumusan kebijakan, sektor

informal sebenarnya memegang peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan bawah. Dalam praktiknya, pendekatan ekonomi pasar kerap kali kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat marginal, sehingga kelompok ini justru terpinggirkan dari arus utama pembangunan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan program pemberdayaan yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat. Salah satu strategi yang bisa diambil adalah dengan mendorong pendirian lembaga keuangan mikro yang mampu menjangkau pelaku usaha kecil, meskipun dengan risiko pembiayaan yang lebih tinggi. Selain itu, penting juga mendorong pemanfaatan teknologi digital agar pelaku usaha kecil bisa naik kelas dan mengakses pasar yang lebih luas, baik nasional maupun global. Digitalisasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan daya saing usaha rakyat dan menjadikan mereka bagian aktif dalam sistem ekonomi (Suryana, 2020).

Gagasan ini menjadi sangat relevan dalam konteks saat ini, di mana kesenjangan akses terhadap pembiayaan dan informasi pasar masih menjadi penghambat utama kemajuan UMKM. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka potensi lokal tidak hanya akan tumbuh secara organik, tetapi juga lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global. Peran negara di sini sangat vital, tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penjamin keberlanjutan program pemberdayaan tersebut, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang besar namun belum tergarap maksimal. Selain dukungan finansial dan teknologi, pendampingan berkelanjutan juga sangat dibutuhkan, agar para pelaku UMKM tidak hanya dibekali secara teknis, tetapi juga secara manajerial dan strategis. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, swasta, dan komunitas lokal pun perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem kewirausahaan rakyat yang produktif dan berkelanjutan.

Berbeda halnya dengan komunitas pengrajin di Kecamatan Rajapolah yang menurut penulis meskipun mengalami kesenjangan antara nilai normatif

ekonomi kerakyatan dan realitas di lapangan menciptakan tantangan serius dalam mempertahankan eksistensi sektor-sektor ekonomi tradisional. Salah satunya adalah industri kerajinan anyaman, yang telah lama menjadi bagian dari warisan budaya sekaligus penopang ekonomi masyarakat lokal. Di tengah gempuran produk pabrikan, fluktuasi permintaan pasar, dan minimnya keterlibatan generasi muda, para pengrajin anyaman tetap bertahan dalam beberapa dekade terakhir.

Berbagai produk anyaman yang dihasilkan oleh para pengrajin di Rajapolah tidak hanya memiliki nilai fungsi dan estetika, tetapi juga mencerminkan semangat ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal. Industri kerajinan ini sebagian besar dijalankan oleh masyarakat setempat dengan skala kecil hingga menengah, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga dan penciptaan lapangan kerja di lingkungan sekitar. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, kegiatan para pengrajin ini mencerminkan prinsip kemandirian, gotong royong, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, mempertahankan dan mengembangkan usaha anyaman tradisional di Rajapolah tidak hanya penting dari segi budaya dan warisan lokal, tetapi juga sebagai upaya konkret dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di daerah tersebut.

Pengrajin anyaman di Rajapolah sebagai salah satu contoh bentuk ekonomi kerakyatan yang masih bertahan sampai saat ini tidak lepas karena adanya hubungan sosial yang lahir dari interaksi yang berjalan secara terus menerus yang akhirnya tercipta solidaritas antara sesama pengrajin. Dalam (Amalia dan Alfitri, 2020) Selama proses interaksi satu sama lain dapat mempengaruhi melalui berbicara atau menukar tanda. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan emosi dan pemikiran, yang pada akhirnya menentukan tindakan yang akan mereka ambil. Sebuah kelompok harus memiliki kesadaran kolektif sebagai pengrajin sehingga sesama pengrajin dapat tumbuh hubungan emosional atau sentimental berdasarkan kesamaan sehingga mereka dapat bersatu dan mencapai tujuan bersama. Karena itu, ikatan solidaritas yang pada dasarnya berasal dari latar belakang yang sama

sebagai pengrajin anyaman dan juga dipengaruhi interaksi sosial yang terus berjalan.

Kerajinan anyaman adalah salah satu dari sekian banyak contoh warisan budaya Indonesia yang dapat ditemukan hampir di seluruh penjuru negeri. Anyaman adalah teknik merajut yang biasanya menggunakan rotan, bambu, daun yang memiliki serat yang dapat ditipiskan seperti daun lontar, daun pandan, eceng gondok, dll. (Lina, 2021). Selain berfungsi sebagai simbol identitas budaya, kerajinan anyaman telah berkembang menjadi sumber pendapatan utama bagi beberapa penduduk setempat terutama di daerah pedesaan. Pengrajin anyaman mampu menciptakan barang-barang dengan nilai estetika dan produk yang signifikan dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti bambu, rotan, atau pandan.

Kecamatan Rajapolah adalah salah satu ikon daerah di Jawa Barat dengan ciri khas kerajinannya. Berdasarkan data dari (Renstra, 2021) dari aspek demografis, jumlah penduduk Kecamatan Rajapolah adalah 50.522 jiwa, yang terdiri dari 25.811 laki-laki dan 24.741 perempuan. Jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Rajapolah terdiri dari 24 TK, 29 SD, 8 SMP, dan 6 SMA. Fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan Rajapolah terdiri dari 1 puskesmas dan 2 puskesmas pembantu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi di Kecamatan Rajapolah terdapat 0 pasar modern (mall/super market/dll), 0 pasar desa, 1 pasar tradisional, 0 pasar musiman.

Rajapolah terletak di sebelah utara Kabupaten Tasikmalaya, Rajapolah telah lama dikenal sebagai salah satu pusat kerajinan tangan di Jawa Barat. Daerah ini terkenal karena produk kerajinannya yang indah dan lokasinya yang strategis. Rajapolah, yang terletak di jalur selatan Pulau Jawa, menghubungkan provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, membuatnya lebih mudah bagi pelaku bisnis dan konsumen yang berasal dari berbagai wilayah. Tidak diragukan lagi, hal ini meningkatkan peluang keuangan bagi penduduk setempat, yang sebagian bergantung pada industri kerajinan.

Sentra kerajinan Rajapolah menawarkan berbagai produk yang mencerminkan inovasi dan keterampilan luar biasa pengrajin lokal. Mulai dari barang-barang fungsional seperti tas, keranjang, dan peralatan rumah tangga hingga barang-barang dekoratif seperti tikar anyaman, kotak perhiasan yang dihias indah, dan bingkai foto yang artistik. Setiap produk memiliki nilai praktis dan estetika, menunjukkan bahwa kerajinan tangan Rajapolah menggabungkan kegunaan dan keindahan (Haiqal dan Hidayat, 2017).



Gambar 1.1 Produk Pengrajin yang dijual belikan

Kerajinan tangan Rajapolah menunjukkan warisan budaya lokal yang kaya. Banyak pengrajin menggunakan teknik tradisional yang telah diajarkan dari generasi ke generasi, sehingga setiap produk memiliki nilai dan sejarah. Dengan semua potensinya, Rajapolah adalah pusat kerajinan dan bagian penting dari identitas budaya Jawa Barat, yang sedikit banyaknya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan dan mengembangkan kerajinan tangan Rajapolah agar produk lokal tetap bertahan dan dikenal lebih luas di dalam negeri maupun manca negara.

Usaha kerajinan adalah salah satu bagian penting dari industri kreatif Indonesia, dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemampuan berbisnis dan menumbuhkan masyarakat yang inovatif. Prosesnya dimulai dari desain awal dan mencakup langkah-langkah pengembangan, pembuatan, dan

promosi produk yang dibuat oleh para pengrajin. Berbagai faktor, termasuk produksi yang efisien, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, pendekatan pemasaran yang efektif, dan ketersediaan modal yang cukup, sangat memengaruhi kemajuan dan keberhasilan industri kerajinan. Untuk memaksimalkan potensi industri ini, juga diperlukan pengelolaan usaha yang baik dan organisasi yang solid (Syarifuddi, dkk., 2022).

Aysa dalam (Rusmania dan Nugroho, 2022) menambahkan bahwa sektor ekonomi kreatif sangat penting untuk menciptakan nilai tambah bagi produk lokal dan mendorong pertumbuhan berbagai jenis jasa kreatif. Sektor ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan dengan menghasilkan nilai tambah pada produk melalui inovasi dan kreativitas. Beberapa alasan mengapa ekonomi kreatif contohnya seperti kerajinan anyaman membantu perekonomian nasional. Pertama, nilai tambah yang dihasilkan oleh produk kreatif meningkatkan daya saing di pasar domestik dan membuka peluang untuk bersaing di pasar internasional. Kedua, sektor ini menciptakan banyak lapangan kerja yang memungkinkan orang dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dan meningkatkan keterampilan dan kreativitas mereka.

Penelitian ini berfokus pada strategi pengrajin anyaman dalam mempertahankan ekonomi kerakyatan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengungkap bagaimana strategi pengrajin anyaman berkontribusi terhadap ekonomi kerakyatan dan bagaimana mereka menghadapi serta mengatasi berbagai tantangan yang ada

Latar belakang ini memberikan gambaran tentang pentingnya topik yang akan diteliti, menjelaskan relevansi industri anyaman dalam konteks ekonomi kerakyatan dan memberikan gambaran umum tentang nilai topik tersebut untuk penelitian lebih lanjut. Dengan uraian tersebut penulis berencana melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Strategi Pengrajin Anyaman Dalam Mempertahankan Ekonomi Kerakyatan di Kecamatan Rajapolah”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan diatas, maka penulis mambatasi pokok permasalahan yang ingin diteliti yaitu :

1. Mengapa pengrajin anyaman di Kecamatan Rajapolah bisa bertahan dalam ekonomi kerakyatan serta apa faktor-faktor penyebabnya?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan pengrajin anyaman di Kecamatan Rajapolah dalam mempertahankan ekonomi kerakyatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan malah yang ditemukan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Agar Mengetahui pengrajin anyaman di Kecamatan Rajapolah bisa bertahan dalam ekonomi kerakyatan serta faktor-faktor penyebabnya.
2. Agar mengetahui strategi yang dilakukan pengrajin anyaman di Kecamatan Rajapolah dalam mempertahankan ekonomi kerakyatan.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperluas cakrawala pengetahuan ilmiah dan memberikan perspektif baru yang lebih mendalam, terutama dalam hal penerapan praktik lapangan yang sering berbeda dengan teori yang diajarkan di perguruan tinggi, khususnya dalam bidang keilmuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan menjembatani perbedaan antara teori dan praktik di lapangan, tetapi juga dapat membantu para akademisi dalam memahami realitas sosial yang dinamis dan kompleks. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperkuat teori-teori yang ada dan memperkuat konsep-konsep yang relevan dengan perkembangan zaman. Hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk penelitian yang lebih khusus dan mendalam, yang pada akhirnya akan membantu kita memahami lebih baik tentang bidang penelitian sosial. Oleh karena itu,

diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki dampak yang luas, baik dalam tataran akademis maupun praktis, dan akan menjadi titik tolak untuk kemajuan studi sosial di masa depan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berfungsi sebagai refleksi dari masalah-masalah yang telah dirumuskan, dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengrajin anyaman dan ekonomi kerakyatan. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perkembangan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan pengrajin, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang membantu para pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam mengembangkan strategi pemberdayaan yang lebih baik. Pada akhirnya, temuan penelitian ini dapat membuka jalan bagi penelitian yang lebih mendalam tentang ekonomi kreatif dan bagaimana mengembangkan komunitas pengrajin dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang hubungan antara keahlian tradisional pengrajin dan perkembangan ekonomi lokal yang berbasis partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu menjelaskan peran penting pengrajin anyaman sebagai aktor dalam mempertahankan warisan budaya dan sebagai penggerak ekonomi lokal yang berbasis komunitas. Selain itu, analisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam proses pembentukan kebijakan atau program pemberdayaan yang lebih efisien yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pengrajin dan memperkuat sistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan sebagai sumber referensi untuk studi mendatang dengan masalah penelitian serupa, baik dalam kaitannya dengan satu variabel maupun keduanya. Dengan memberikan data, hasil, dan analisis yang relevan dan menyeluruh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan penting bagi para peneliti di masa yang akan datang. Hal ini tidak hanya akan memperkaya khazanah ilmiah tetapi juga akan membantu penelitian di masa depan dengan menyediakan kerangka teoritis, metodologi, dan temuan yang dapat digunakan sebagai acuan.

d. Bagi Universitas

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan menambahkan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini solidaritas sosial masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada melalui pendekatan yang komprehensif dan analisis yang mendalam. Peneliti percaya bahwa penelitian ini akan memberikan nilai tambahan dalam hal pemahaman konseptual dan penerapan praktis. Peneliti berharap temuan ini akan menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan lebih banyak rencana untuk mendukung ekonomi kerakyatan.

E. Kerangka Berpikir

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama ekonomi, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan. Konsep ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta menjadi landasan penting untuk memahami keberadaan pengrajin anyaman di Rajapolah. Menurut Hatta, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang memberdayakan koperasi, usaha bersama, dan pengelolaan sumber daya yang dikelola oleh rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat banyak. Karena digerakkan oleh masyarakat, berfokus pada potensi daerah, dan tidak bergantung pada pemilik modal besar, usaha pengrajin ini mencerminkan semangat ekonomi kerakyatan (Hatta, 1954). Kekuatan utamanya terletak pada semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat, yang menjadi ciri khas ekonomi kerakyatan menurut pandangan Hatta.

Namun, berbanding terbalik dengan kenyataan dalam beberapa tahun terakhir, arah pembangunan ekonomi Indonesia cenderung berpihak pada sistem pasar bebas yang membuka ruang sebesar-besarnya bagi kekuatan modal besar untuk mendominasi sektor-sektor strategis. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha berskala besar semakin diuntungkan, baik dalam akses terhadap sumber daya, regulasi yang mendukung, hingga kemudahan dalam memperoleh insentif pemerintah. Sebaliknya, kelompok usaha kecil dan menengah (UMKM), yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, justru kerap terpinggirkan oleh ketatnya persaingan dan minimnya perlindungan kebijakan (Gayatri & Nurranto, 2023).

Sama halnya dengan komunitas pengrajin di Kecamatan Rajapolah yang menurut penulis mengalami kesenjangan antara nilai normatif ekonomi kerakyatan dan realitas di lapangan menciptakan tantangan serius dalam mempertahankan eksistensi sektor-sektor ekonomi tradisional. Salah satunya adalah industri kerajinan anyaman, yang telah lama menjadi bagian dari warisan budaya sekaligus penopang ekonomi bagi sebagian masyarakat lokal. Di tengah gempuran produk pabrikan, fluktuasi permintaan pasar, dan minimnya keterlibatan generasi muda, para pengrajin anyaman tetap bertahan dalam beberapa dekade terakhir.

Memperkuat ekonomi kerakyatan merupakan strategi yang krusial untuk mengatasi tiga masalah besar: ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi yang semakin menganga. Ekonomi kerakyatan tidak hanya dipandang sebagai alat pemulihan pasca-pandemi COVID-19, tetapi juga sebagai fondasi bagi pertumbuhan inklusif yang memilah manfaatnya secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bertahannya ekonomi kerakyatan pada komunitas pengrajin anyaman di Kecamatan Rajapolah menjadi sebuah fenomena sosial-ekonomi yang menarik untuk diteliti, terutama karena hal ini terjadi di tengah realitas ekonomi nasional dan global yang semakin condong berpihak kepada kelompok pengusaha besar dan korporasi. Dalam sistem ekonomi modern yang kompetitif, sektor informal dan pelaku usaha kecil seringkali tersingkirkan oleh kekuatan modal, teknologi, dan jaringan distribusi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Namun, keberadaan komunitas pengrajin anyaman di Rajapolah menunjukkan adanya daya tahan dan ketangguhan ekonomi berbasis komunitas yang justru tumbuh dengan mengandalkan kerja kolektif, solidaritas sosial, serta keberlanjutan budaya lokal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak memiliki akses luas terhadap modal dan pasar global, komunitas tersebut mampu mempertahankan eksistensinya melalui prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang menekankan keadilan sosial, pemerataan, dan kemandirian. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memungkinkan komunitas ini bertahan dan berkembang menjadi sangat relevan dalam upaya mengembangkan model ekonomi alternatif yang inklusif dan berkelanjutan.

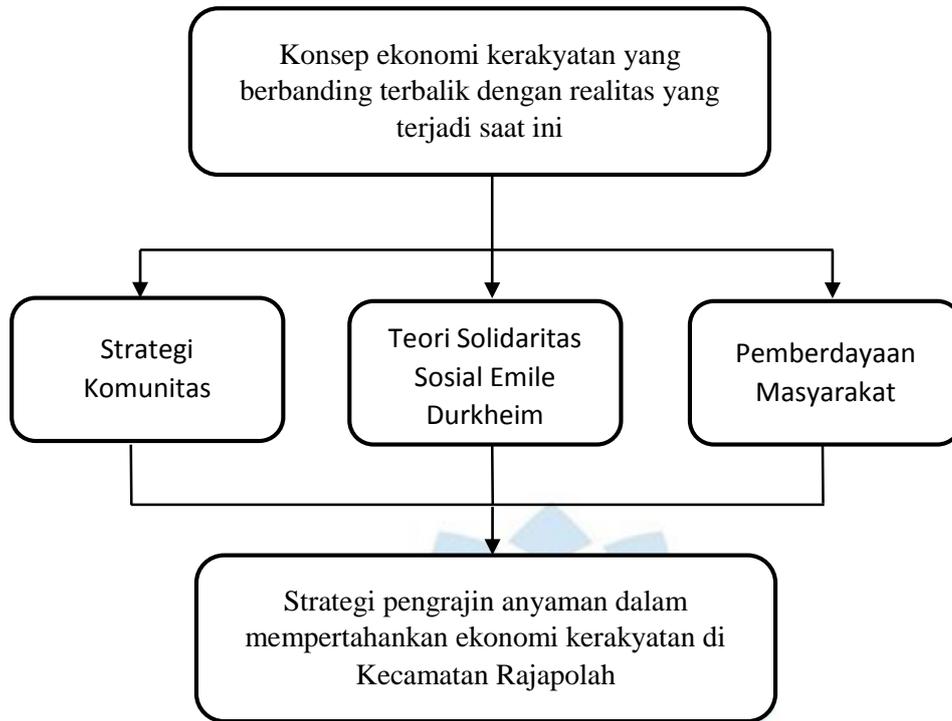
Selain itu, amanat konstitusi negara juga sesuai dengan keberadaan usaha kerajinan rakyat seperti yang ada di Rajapolah. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ketetapan ini berfungsi sebagai landasan normatif bagi persyaratan bahwa sistem ekonomi Indonesia mendorong usaha-usaha yang mengutamakan persatuan, keadilan sosial, dan cita-cita kemakmuran bersama (UUD 1945, Pasal 33 Ayat 1). Oleh karena itu, inisiatif untuk melestarikan dan meningkatkan persatuan pengrajin tidak hanya merupakan konsep sosio-ekonomi, tetapi juga merupakan bagian untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusional.

Dengan demikian, solidaritas sosial yang terbangun di antara pengrajin anyaman di Rajapolah tidak hanya memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari

pelaksanaan ekonomi kerakyatan dan amanat konstitusi. Modal sosial berupa kerja sama, gotong royong, dan jaringan antar pelaku usaha menjadi penopang penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi lokal. Penelitian ini berusaha mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk solidaritas itu diwujudkan dan bagaimana peranannya dalam menjaga eksistensi ekonomi kerakyatan di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Oleh karena itu, solidaritas sosial di antara para pengrajin anyaman Rajapolah tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi juga menjadi contoh konkret bagaimana strategi mempertahankan ekonomi kerakyatan diimplementasikan. Kerja sama, gotong royong, dan jaringan di antara para pelaku usaha merupakan contoh modal sosial yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan ekonomi lokal. Dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara rinci bagaimana bentuk solidaritas dicapai dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada keberlangsungan ekonomi kerakyatan (Nasution, 2018).

Kerangka berpikir digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian dan memecahkan masalah penelitian. Ini juga merupakan sintesa yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti. Kerangka berpikir juga digunakan untuk membuat bagan alur dengan penjelasan kualitatif (Suryani, 2019). Secara sederhana, kerangka berfikir dalam penelitian Solidaritas Pengrajin Anyaman Dalam Mempertahankan Ekonomi Kerakyatan di Kecamatan Rajapolah dapat dijadikan bagan sebagai berikut.



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

Sumber: Olahan Peneliti, 2025